



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI IV DPR RI
MASA SIDANG IV TAHUN SIDANG 2023-2024
KE PROVINSI BANTEN**

*

**

**

*

JAKARTA 2024



LAPORAN

KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI IV DPR RI KE PROVINSI BANTEN MASA SIDANG IV TAHUN SIDANG 2023-2024 1-3 APRIL 2024

I. PENDAHULUAN

A. DASAR KUNJUNGAN KERJA

Dasar hukum yang dipergunakan dalam melaksanakan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke Provinsi Banten adalah:

1. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang tentang Tata Tertib:
 - a. Pasal 59 ayat (4) butir d: Tugas komisi dalam bidang pengawasan adalah melakukan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah.
 - b. Pasal 59 ayat (5) butir f: Komisi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dapat mengadakan kunjungan kerja.
2. Keputusan Rapat Paripurna tanggal 6 Februari 2024.
3. Keputusan Rapat Intern Komisi IV DPR RI tanggal 6 Maret 2024.

B. RUANG LINGKUP

Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke Provinsi Banten merupakan rangkaian tugas dan fungsi DPR RI dalam bentuk pengawasan terhadap Kebijakan Pemerintah serta permasalahan yang sering terjadi di sektor pangan pada saat menjelang bulan suci Ramadhan.

C. TUJUAN

Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke Provinsi Banten bertujuan untuk:

1. Mendengarkan penjelasan, berdialog, dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Daerah, Mitra Kerja Komisi IV DPR RI (Perum BULOG, BAPANAS, ID FOOD, dan PT Pupuk Indonesia) terkait dengan

permasalahan ketersediaan, pasokan, dan harga pangan di Provinsi Banten Menjelang Perayaan Hari Raya Idul Fitri 1445 H/2024 M.

2. Melakukan peninjauan ke Gudang BULOG dan berdiskusi dengan stakeholder terkait dengan permasalahan ketersediaan dan harga pangan pokok (beras, daging telur, dan minyak goreng) di Kabupaten Tangerang Provinsi Banten.

D. SUSUNAN TIM

Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke Provinsi Banten dipimpin oleh Ibu Anggia Erma Rini, M.K.M. (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-PDIP) dan diikuti oleh para Anggota Komisi IV DPR RI.

E. PELAKSANAAN DAN LOKASI KUNJUNGAN

Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke Provinsi Banten dilaksanakan pada tanggal 1-3 April 2024. Lokasi yang dipilih untuk Kunjungan Kerja Spesifik adalah Komplek Pergudangan BULOG, Sangiang, Kota Tangerang.

II. GAMBARAN UMUM

Tingginya harga harga bahan pangan pokok utamanya beras, dalam memasuki tahun 2024 di berbagai daerah telah menjadi perhatian dan keprihatinan yang besar bagi Komisi IV DPR RI, kondisi ini belum juga mereda meskipun di beberapa daerah sentra penghasil padi telah memasuki masa panen dan bahkan pemerintah telah mengelontorkan impor beras lebih dari 3 juta ton agar harga beras turun, akan tetapi nyatanya harga beras yang tinggi seolah tak bergeming untuk tetap berada pada harga yang tinggi. Berbagai kegiatan operasi beras murah yang dilakukan pemerintah melalui program Stabilisasi Pangan dan Harga Pangan (SPHP) yang dilakukan oleh Bulog, belum banyak memberikan dampak yang signifikan dalam penurunan harga beras di tingkat konsumen. Operasi pasar yang dilakukan selain banyak diserbu dan malah membuat antrian panjang yang mengular dan sungguh merupakan pemandangan yang kurang elok bagi Indonesia sebagai sebuah negara agraris yang *gemah ripah loh jinawih*.

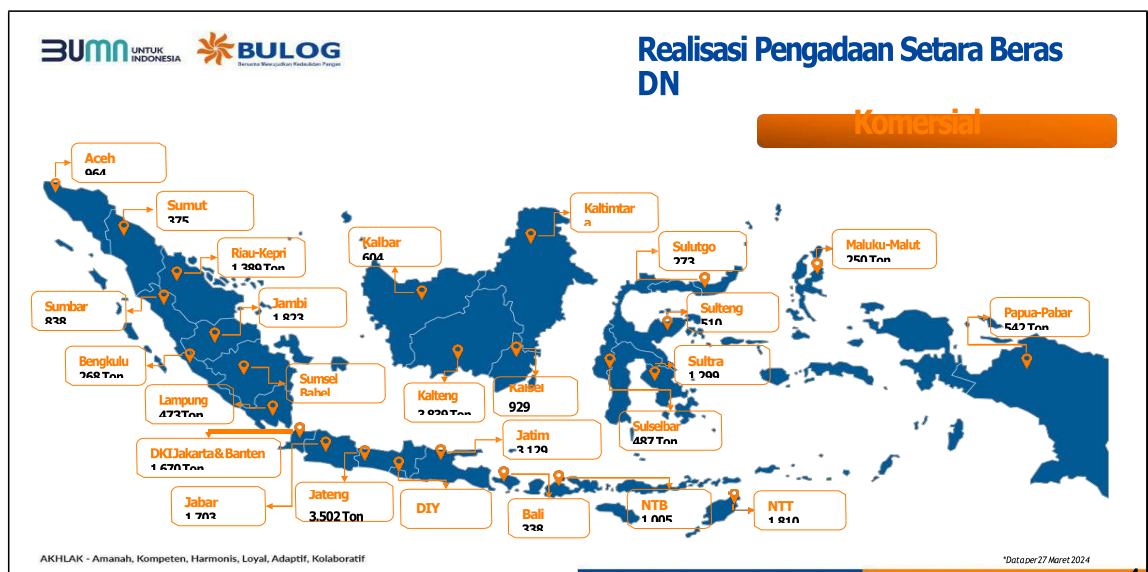
Kondisi harga beras yang tidak kunjung turun saat memasuki dan menjelang lebaran 1445 H; ditambah dengan berbagai kebutuhan pokok seperti sayuran, bawang merah, cabe merah, cabe rawit, daging sapi, daging dan telur ayam

juga ikut naik, tentu saja juga semakin menekan pengeluaran masyarakat ditengah tengah kondisi ekonomi yang masih sulit.

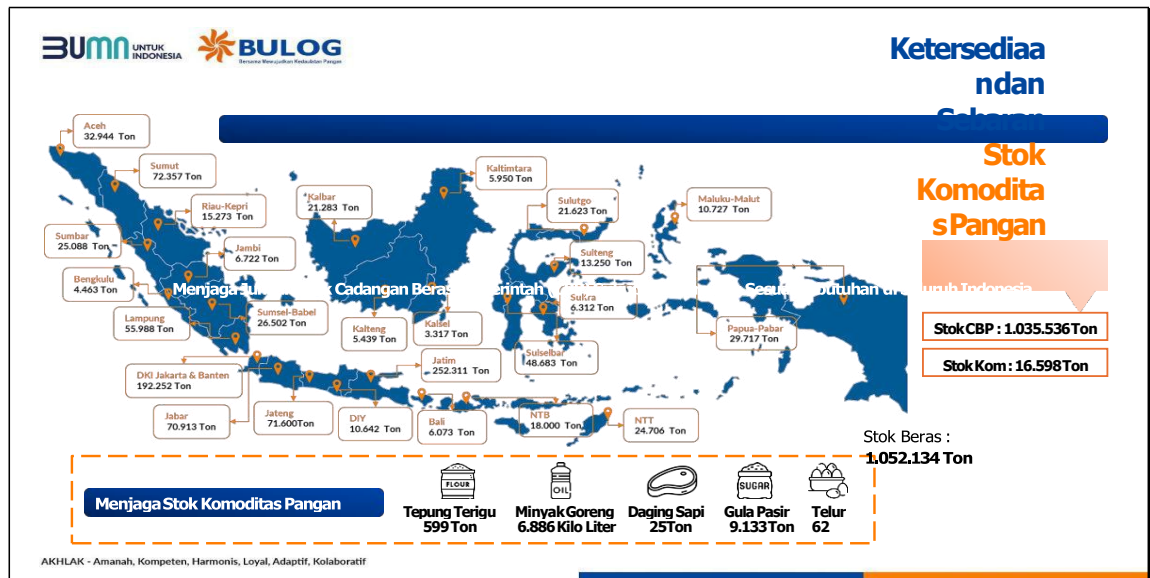
Kenaikan harga beras terus terjadi di berbagai daerah di Indonesia di mulai sejak bulan September 2022. Hingga dengan Februari 2024 ternyata harga beras terus mengalami kenaikan. Awal tahun 2024 kita dihentikan dengan kenaikan harga beberapa komoditas pangan pokok kita. Harga beras premium mengalami kenaikan lebih dari Rp2,500,00 per kilogramnya, sementara itu kenaikan beras medium yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat kecil mengalami kenaikan yang lebih tinggi lagi dibandingkan dengan beras premium, yaitu sebesar Rp3.500,00/kilogram.

K o m o d i t a s yang mengalami kenaikan cukup tinggi lainnya adalah cabe rawit merah berdasarkan Harga Acuan Pemerintahnya (HAP) adalah Rp40.000,00 - Rp57.000,00 per kilogram dan naik menjadi rerata Rp68.100,00/kilogram, cabe merah kriting dari antara Rp37.000,00 – Rp57.000,00 menjadi Rp70.500,00 per kilogramnya, jagung dari harga Rp5.000,00 menjadi Rp9.094,00/kilogram dan kedele dari harga Rp12,000,00 menjadi Rp13.482,00 per kilogramnya.

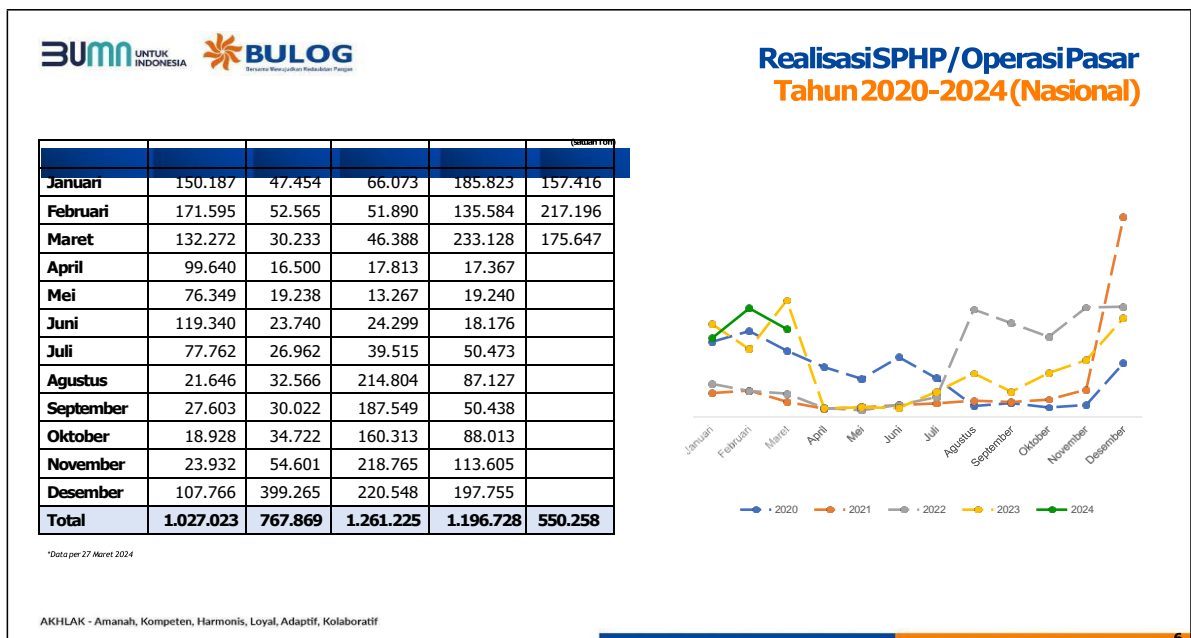
Pengadaan beras di dalam negeri yang dilakukan BULOG melalui pembelian gabah petani sulit untuk dilaksanakan, karena harga Gabah Kering Giling (GKG) di tingkat petani sudah jauh melebihi Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang ditetapkan pemerintah, meskipun BULOG tetap melakukan pembelian gabah petani akan tetapi dilakukan melalui skema pembelian secara komersil; dan pembelian tersebut jumlahnya hanya sebesar 30 ribu ton setara beras dalam setahunnya.



Dalam menghadapi lebaran BULOG masih memiliki stok cadangan beras pemerintah yang relatif aman, yaitu sebesar satu juta ton lebih.



Terus meningkatnya harga beras di pasar baik yang kualitas premium maupun medium menyebabkan pemerintah melakukan upaya untuk melakukan stabilisasi pangan dan harga pangan BULOG telah melakukan operasi pasar dengan beras SPHP, secara nasional realisasi dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut:



Realisasi Bantuan Pangan Tahun 2024 (Nasional)

Uraian	Mengurangi beban pengeluaran Penerima Bantuan Pangan (PBP) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan beras
Periode	Januari-Juni 2024
Anggaran	22.004.077 PBP sesuai data dari Kemenko PMK
Alokasi	10 Kg/PBP/bulan dengan kualitas beras CBP Medium
Aspek Teknis	BADAN PANGAN NASIONAL
Instansi	KPA: Bapanas/ Kemenkeu (Menggunakan Dana CBP)

*Data per 27 Maret 2024



AKHLAK - Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif

NO	KANWIL	PAGU 3 ALOKASI	REALISASI (Kg)			%
			s.d kemarin	hari ini	TOTAL	
1	ACEH	15.927.420	15.116.220	60.140	15.176.360	95,28%
2	SUMUT	28.027.680	24.224.570	1.412.010	25.636.580	91,47%
3	RIAU-KEPRI	11.820.030	10.891.720	265.720	11.157.440	94,39%
4	SUMBAR	11.817.390	11.061.770	106.720	11.168.490	94,51%
5	JAMBI	6.133.740	5.866.020	196.760	6.062.780	98,84%
6	SUMSEL-BABEL	18.573.180	16.856.250	623.680	17.479.930	94,11%
7	BENGKULU	4.990.770	4.963.830	26.940	4.990.770	100,00%
8	LAMPUNG	24.890.250	24.890.250	-	24.890.250	100,00%
9	DKI & BANTEN	28.243.650	26.489.670	1.013.370	27.503.040	97,38%
10	JABAR	133.368.030	129.247.960	978.370	130.226.330	97,64%
11	JATENG	70.678.950	69.502.960	695.620	70.198.580	99,32%
12	DIY	48.436.830	46.685.140	1.651.970	48.337.110	99,79%
13	JATIM	103.161.270	91.828.920	4.166.030	95.994.950	93,05%
14	KALBAR	10.637.220	9.807.100	324.840	10.131.940	95,25%
15	KALTIMHRA	4.339.980	4.339.980	-	4.339.980	100,00%
16	KALSEL	5.933.940	5.933.940	-	5.933.940	100,00%
17	KALTENG	3.416.400	3.416.400	-	3.416.400	100,00%
18	SULUT-GO	8.909.760	8.142.200	210.460	8.352.660	93,75%
19	SULTENG	7.542.480	7.211.370	221.590	7.432.960	98,55%
20	SULTRA	6.582.840	6.582.840	-	6.582.840	100,00%
21	SULSELBAR	24.913.020	23.865.500	422.700	24.288.200	97,49%
22	BALI	5.738.580	4.379.930	247.310	4.627.240	80,63%
23	NTB	19.290.000	16.835.760	710.700	17.546.460	90,98%
24	NTT	26.079.180	14.788.790	363.870	15.152.660	58,10%
25	MALIKU-MALLU	5.920.380	5.881.710	-	5.881.710	99,35%
26	PAPUA-PAPAR	24.749.340	10.375.240	1.068.860	11.444.100	46,24%
TOTAL		660.122.310	599.186.040	14.767.660	613.953.700	93,01%

Sementara itu realisasi bantuan pangan untuk provinsi DKI Jakarta dan Banten dari alokasi sebesar 28.243.650 ton telah tersalurkan sebanyak 27.503.040 ton atau sebesar 97,38 persen.

Realisasi Pengadaan Setara Beras Tahun 2024 Kanwil DKI Jakarta & Banten

Pengadaan Luar Negeri

Pengadaan Dalam Negeri

PSO

Target : 7.900 Ton

Realisasi : 0 Ton

Komersil

Target : 5.550 Ton

Realisasi : 1.670 Ton*
 *Capaian : 30,09%

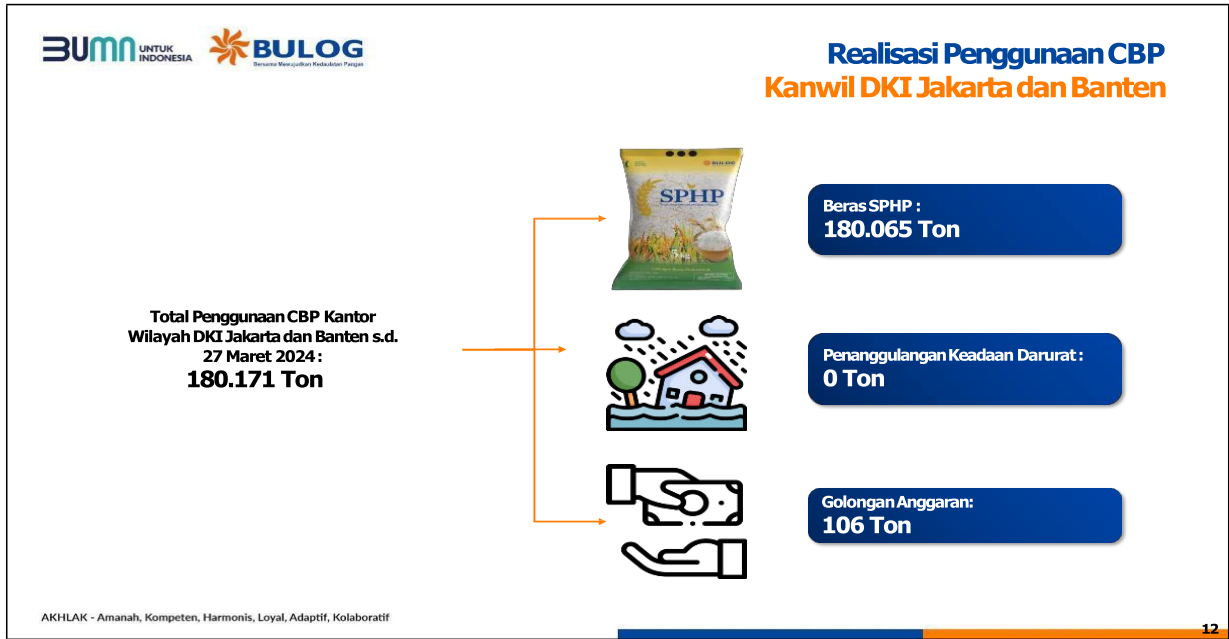
Tahap	Muatan (Ton)	Jenis Beras	TA Pelabuhan	Status
Tahap 1	94.500	Vietnam White Rice 5% Broken	Minggu ke I & II bulan Maret	Sedang Bongkar
	3.500	Thailand White Rice 5% Broken	Minggu ke II bulan Maret	Sedang Bongkar
	11.000	Pakistan White Rice 5% Broken	To Be Announced	
Total Muatan Tahap 1 : 109.000 Ton				
Tahap 2	52.400	Thailand White Rice 5% Broken	Minggu ke III bulan Maret	Dalam perjalanan
	9.000	Pakistan White Rice 5% Broken	To Be Announced	
Total Muatan Tahap 2 : 61.400 Ton				

AKHLAK - Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif

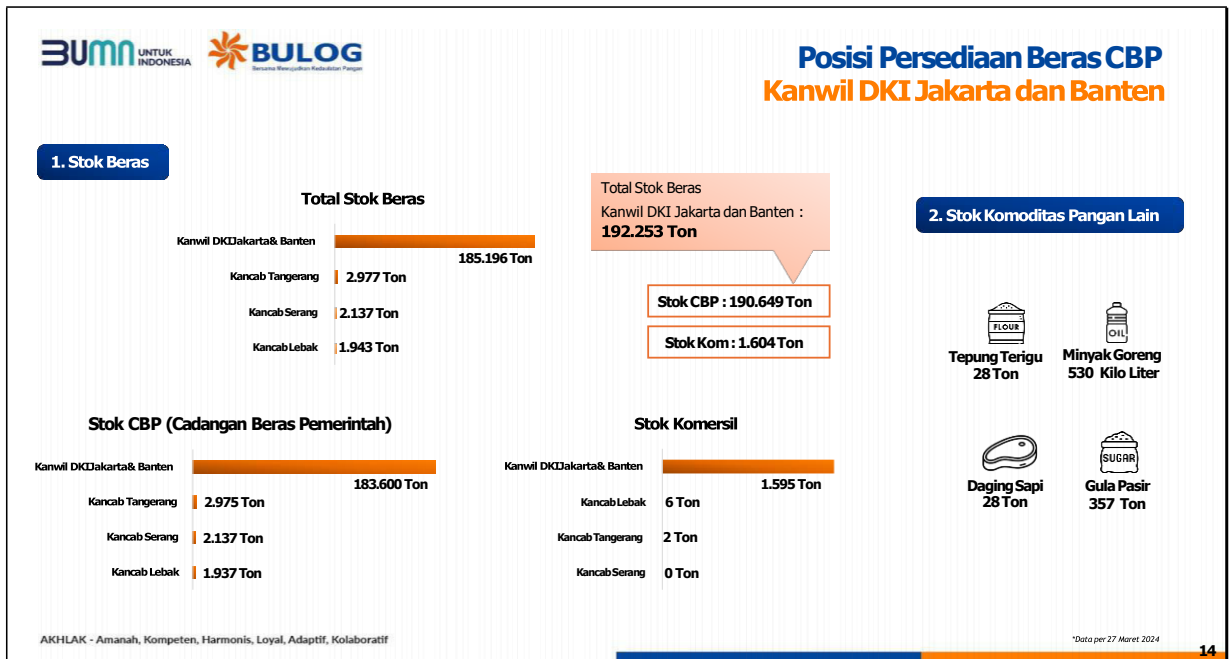
*Data per 27 Maret 2024

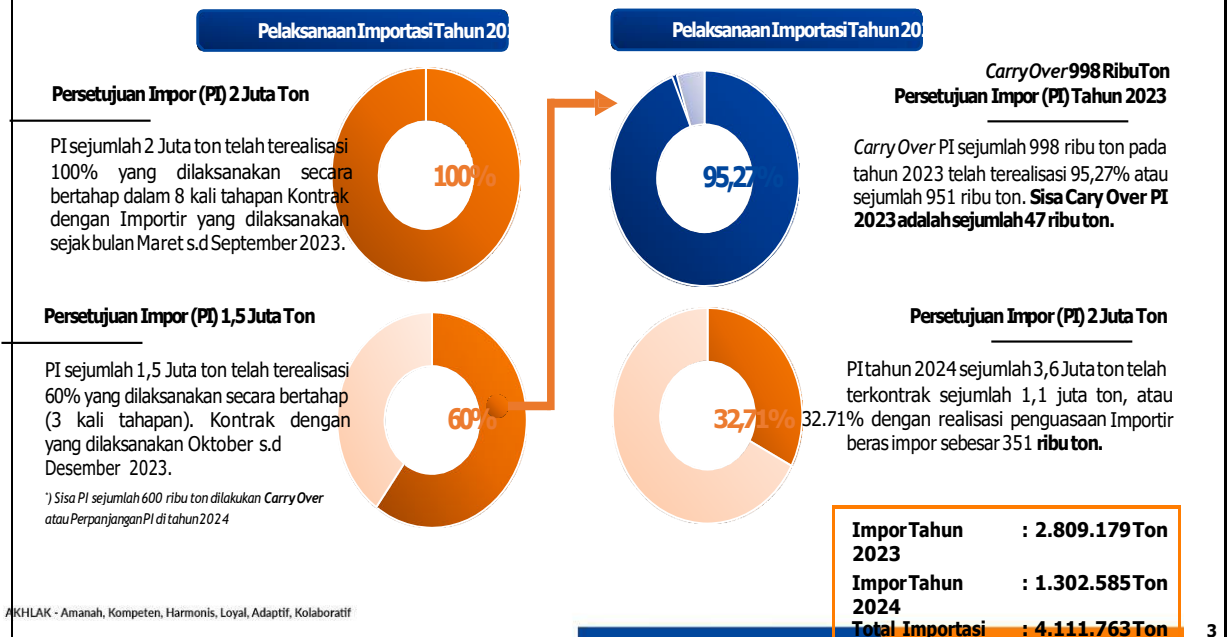
Pengadaan Bulog dari panen di dalam negeri untuk provinsi Banten dan DKI Jakarta dari target sebesar 7.900 ton tidak dapat direalisasikan karena harga gabah yang di atas harga HPP nya. Sementara untuk pengadaan secara komersial dari target

5.550 ton dapat direalisasikan sebanyak 1.670 ton atau sebesar 30,09 persen.



Realisasi penggunaan beras Cadangan Pemerintah sampai dengan akhir maret telah mencapai 180.171 ton, dengan rincian untuk beras SPHP sebanyak 180.065 ton dan untuk golongan anggaran sebanyak 106 ton.





Persetujuan Impor (PI) yang dikeluarkan pemerintah kepada BULOG sejumlah 2 Juta ton telah terealisasi 100% yang dilaksanakan secara bertahap dalam 8 kali tahapan kontrak dengan Importir yang dilaksanakan sejak bulan Maret s.d September 2023. PI sejumlah 1,5 Juta ton telah terealisasi 60% yang dilaksanakan secara bertahap (3 kali tahapan). Kontrak dengan Importir yang dilaksanakan Oktober s.d Desember 2023. Sisa PI sejumlah 600 ribu ton dilakukan Carry Over atau Perpanjangan PI di tahun 2024 Carry Over PI sejumlah 998 ribu ton pada tahun 2023 telah terealisasi 95,27% atau sejumlah 951 ribu ton. Sisa Carry Over PI 2023 adalah sejumlah 47 ribu ton. PI tahun 2024 sejumlah 3,6 Juta ton telah terkontrak sejumlah 1,1 juta ton, atau 32,71% dengan realisasi penguasaan beras impor sebesar 351 ribu ton. Persetujuan Impor (PI) 2 Juta Ton Persetujuan Impor (PI) 1,5 Juta Ton Persetujuan Impor (PI) 2 Juta Ton Carry Over 998 RibuTon Persetujuan Impor (PI) Tahun 2023 I. Dengan demikian maka Impor Tahun 2023: 2.809.179 Ton Impor Tahun 2024: 1.302.585 Ton Total Importasi: 4.111.763 Ton.

III. HASIL KUNJUNGAN KERJA

Pada Kunjungan Spesifik Ke Komplek Pergudangan Sangiang Perum BULOG di Kotamadya Tangerang – Provinsi Banten. Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI diterima oleh Direktur Bisnis Perum BULOG – Febby Novita. Hadir dalam Kesempatan kunjungan kerja spesifik adalah dari Badan Pangan

Nasional yang diwakili oleh Sekretaris Utama BAPANAS Dr. Sarwo Edi, Dirjen Perkebunan – mewakili Kementerian Pertanian, Perwakilan d a r i Kementerian KKP, Pejabat Bupati Kabupaten Tangerang, Perwakilan PT Pupuk Indonesia Holding, Perwakilan dari ID Food.

Perum BULOG

Dalam penjelasannya Direktur Bisnis Perum BULOG, Febby Novita menyampaikan hal sebagai berikut.

1. Ketersediaan beras di Kota Tangerang mencapai rata-rata kebutuhan 18.351 ton per bulan, dengan stok beras yang tersedia yaitu mencapai 110.000 ton.
2. Stok beras akan terus bertambah sehingga menjelang Hari Raya Idul Fitri ketersediaan beras akan tetap aman.
3. Beras di Tangerang mencapai harga yang terkendali meskipun terdapat kenaikan rata-rata 10%, akan tetapi harga tersebut masih dalam batas toleransi dan harga beras Stabilitas Harga Pangan (SBHP) yang tetap mengikuti standar pemerintah.
4. HPP maksimal pembelian bulog 5rb utk harga gabah PAO dg beberapa syarat sehingga bulog tdk bisa menyerap gabah petani dikarenakan harga gabah ditingkat petani mencapai 7.500.
5. Perum BULOG mendapatkan surat dari asosiasi penggilingan agar tidak ikut rebutan gabah dengan para penggiling.
6. Terdapat beberapa bantuan yg sulit disalurkan di daerah – daerah *remote* karena masalah ketersediaan transportasi.
7. Perum BULOG membutuhkan sebanyak mungkin jaringan pasar untuk menyalurkan cadangan beras pemerintah dalam upaya stabilisasi harga.
8. Agar beras SPHP tidak mengganggu harga gabah di tingkat petani, maka beras SPHP yang dikeluarkan oleh BULOG hanya dalam kemasan 5 Kg.

Pemerintah Kota Tangerang

Pada Kesempatan tersebut Pj. Walikota Tangerang menyampaikan hal terkait dengan kondisi pangan pokok di daerahnya, sebagai berikut:

1. Pemkot Tangerang telah melakukan berbagai upaya untuk ketersediaan pangan yaitu pemantauan harga secara rutin.
2. PemkotTangerang telah menyalurkan beras ke 39 titik untuk memastikan harga

pangan tetap terkendali.

3. Pemkot Tangerang menyelenggarakan bazar Pangan Murah yang dilakukan serentak di 104 kelurahan untuk memfasilitasi kesediaan bahan pokok dengan harga yang terjangkau.
4. Pemkot Tangerang terus berupaya untuk memastikan stok bahan pangan menjelang Hari Raya Idul Fitri ketersediaannya terpenuhi.

Badan Pangan Nasional

Badan Pangan Nasional yang di wakili oleh Sestama Bapanas menjelaskan terkait dengan situasi dan kondisi pangan nasional sebagai berikut:

1. Berdasarkan Panel Harga Pangan (BKP) harga GKP rata-rata nasional adalah 6.260/kg. sedangkan HAP adalah 5.200
2. Menjamin stok beras panen raya akan terus berlangsung hingga bulan Juni serta meminta memperbanyak mesin beras ukuran 5kg.
3. Harga jagung rata-rata nasional adalah 4.530/kg. Untuk penyaluran jagung sudah mencapai 254rb ton dan khusus wilayah banten telah mencapai 97,38%.
4. Stabilitas pasokan dan Harga Pangan (SPHP) jagung telah disalurkan sebanyak 74% kepada para peternak.
5. Impor jagung di hentikan karena adanya musim panen dalam negeri.
6. Memdorong penyediaan dryer agar pengeringan tidak hanya bergantung pada cuaca.

Perwakilan Kepala Pasar

1. Pasar mengalami kesulitan dalam mencari bantuan.
2. Bantuan operasi pasar dari Perum Bulog baru sampai 1-2 kios di akhir Februari dan hanya beberapa kios yang dapat menyalurkan beras dari bulog.
3. Harga beras mengalami penurunan menjadi Rp11.000,00/kg untuk jenis medium, dan Rp14.000,00/kg untuk beras jenis premium.
4. Untuk harga bahan pangan lain seperti cabai juga mengalami penurunan di angka Rp60.000,00/kg.

Tanggapan Komisi IV DPR RI

1. Dalam mengatasi masalah pangan utamanya beras, menurut Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dr. Anggia Erma Rini, diperlukan adanya strategi yang jitu untuk meningkatkan produksi beras lokal agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Kekurangan produksi beras di dalam negeri selain disebabkan oleh perubahan iklim (El Nino) yang menyebabkan musim tanam mundur, penurunan produksi

juga diakibatkan adanya konversi lahan pertanian khususnya lahan sawah ke penggunaan non-pertanian di sentra-sentra produksi padi terutama di Jawa. Melonjaknya harga beras yang terjadi akhir-akhir ini merupakan yang tertinggi dalam sejarah, karena produksi beras dalam negeri tidak bisa memenuhi kebutuhan masyarakat.

2. Untuk mengetahui jumlah kebutuhan beras, maka pemerintah harus mampu menyediakan data yang akurat terkait luas panen, lokasi serta waktu panen untuk seluruh sentra produksi di Indonesia, sehingga bila diperlukan tambahan kebutuhan dari sumber lain (impor), maka pemerintah dapat menghitungnya dengan tepat.
3. Anggota Komisi IV DPR RI Ansy Lema mengatakan, selama ini dari tahun ketahun harga beras dan jumlah total impor semakin tinggi. Selama ini, pemerintah masih bekuat pada persoalan mewujudkan ketahanan pangan atau food security, padahal dalam konstitusi disebutkan bahwa pemerintah harus mampu bukan hanya mewujudkan ketahanan pangan akan tetapi harus mampu untuk terwujudnya kedaulatan pangan. Berbicara masalah pangan, adalah soal hidup dan matinya sebuah bangsa karena ini aspek esensial dan primer, kita tidak boleh tergantung pada impor dari luar terus menerus.
4. Dalam upaya menyelesaikan ketersediaan pupuk di berbagai daerah sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat, Menurut Komisi IV DPR RI PT PIHC memiliki janji yang di sampaikan kepada Komisi IV DPR RI untuk melakukan penambahan jumlah kios dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan penyaluran pupuk bersubsidi.
5. Untuk memenuhi permintaan dari para pedagang beras di pasar tradisional dan memperluas upaya untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dalam mengakses beras yang di subsidi komisi IV DPR RI meminta BULOG untuk menambah beras sphp di kota tanggerang dan menyalurkannya bukan hanya ke pasar modern akan tetapi juga diperluas ke pasar-pasar tradisional.
6. Komisi IV DPR RI mempertanyakan kepada BULOG terkait kebijakan stabilisasi harga beras melalui penyaluran beras SPHP; apakah sudah ada penelitian sejauh mana keefektifannya serta memiliki dampak yang signifikan .
7. Harga pembelian pemerintah (HPP) gabah meskipun telah dinaikan harga Acuan pembeliannya, akan tetapi tetap saja tidak meningkatkan kemampuan pemerintah untuk membeli gabah petani, sehingga pembelian BULOG terus

menurun. Hal ini disebabkan karena secara riil dilapangan harga GKP sudah jauh diatas harga acuan pemerintah.

8. Pembelian gabah petani oleh pemerintah yang dilakukan oleh BULOG bukan hanya sekedar menyerap gabah yang dihasilkannya akan tetapi juga mampu merangsang petani untuk terus berproduksi dan meningkatkan kesejahteraan petaninya. Kebutuhan kedelai nasional setiap tahunnya sekitar 2.3 jt ton, padahal produksi di dalam negeri paling tinggi hanya 6.000 ton. Bagaimanan strategi pemerintah dalam upaya meningkatkan produksi kedelai.
9. Di beberapa daerah saat ini sedang terjadi panen jagung dan harga jagung turun sampai dengan Rp2.000,00/kg. Komisi IV DPR RI meminta kepada pemerintah untuk mengatasi jatuhnya harga jagung di tingkat petani, minimal sesuai dengan harga acuan pemebelannya yaitu Rp4.000,00/kg.

IV. KESIMPULAN

Pokok-pokok hasil Kunjungan Kerja Spesifik dalam rangka peninjauan secara langsung mengenai ketersediaan pangan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1445H adalah sebagai berikut:

1. Komisi IV DPR RI mengapresiasi upaya Pemerintah Pusat dan Kota Tangerang dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan khususnya di Kota Tangerang. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah Kota Tangerang untuk terus melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam memastikan pasokan pangan agar tetap terjaga.
2. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah dan Perum Bulog untuk melakukan kajian dan evaluasi mengenai efektivitas dan dampak dari program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) yang telah dilaksanakan.
3. Komisi IV DPR merekomendasikan kepada pemerintah untuk melakukan perbaikan terhadap infrastruktur dan input produksi serta insentif terhadap upaya peningkatan produksi yg dilakukan oleh petani dalam menghasilkan pangan guna mewujudkan kecukupan dan kedaulatan pangan nasional.

V. PENUTUP

Demikian laporan Kegiatan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke Provinsi Banten. Selanjutnya, seluruh aspirasi dan tanggapan beberapa pihak akan ditindaklanjuti pada Rapat Kerja maupun Rapat Dengar Pendapat bersama dengan Mitra Komisi IV DPR RI. Semoga kunjungan kerja ini dapat memberikan manfaat

bagi kita semua khususnya untuk masyarakat Provinsi Banten.

Jakarta, April 2024

Ketua Tim,

Ttd.

Dr. Anggia Erma Rini, M.K.M.

LAMPIRAN

1. Dokumentasi Kegiatan



2. Link Media

- a. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/49112/t/Perlu+Strategi+Jitu+Tingkatkan+Produksi+Beras+Lokal>
- b. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/49107/t/Harga+Beras+Masih+Tinggi%2C+Ansy+Lema+Singgung+Kedaulatan+Pangan>
- c. <https://www.youtube.com/watch?v=S0XEyAIFvil>
- d. <https://www.instagram.com/reel/C5UocEwv6WL/?igsh=NjZiM2M3MzIxNA%3D%3D>
- e. <https://banten.antaranews.com/berita/280590/wali-kota-tangerang-sebut-kebutuhan-beras-per-bulan-capai-18351-ton>
- f. <https://tangerangpos.id/kunjungan-spesifik-komisi-iv-dpr-ri-pj-wali-kota-nurdin-jelang-idul-fitri-stok-pangan-tercukupi/>
- g. <https://www.tangerangkota.go.id/berita/detail/41915/dikunjungi-komisi-iv-dpr-ri-pj-jelang-idul-fitri-stok-pangan-tercukupi>